

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129)

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58)

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138)

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266)

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185)

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik

Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works of September 9, 1886, completed at Paris on May 4, 1896, revised at Berlin on November 13, 1908, completed at Berne on March 20, 1914, revised at Rome on June 2, 1928, revised at Brussels on June 26, 1948, and revised at Stockholm on July 14, 1967

The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) adopted by the United Nations General Assembly on 16 December 1966, and in force from 3 January 1976

The Universal Declaration on Human Rights adopted by the United Nations General Assembly on 10 December 1948 at the Palais de Chaillot, Paris

World Intellectual Property Organization (WIPO) Copyright Treaty

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
1.5 Metode Penelitian.....	13
1.5.1 Tipe Penelitian Hukum	13
1.5.2 Pendekatan-pendekatan (<i>Approaches</i>).....	14
1.5.3 Bahan Hukum (<i>Legal Sources</i>)	15
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	16
1.5.5 Analisis Bahan Hukum	16
1.5.6 Sistematik Penulisan	17
BAB II PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENULIS DI APLIKASI IPUSNAS	19
2.1 Konsep Perlindungan Hak Ekonomi	19
2.1.1 Konsep Perlindungan Hak Ekonomi di negara <i>Common Law System</i> 19	
2.1.2 Konsep Perlindungan Hak Ekonomi di negara <i>Civil Law System</i> ..	20
2.2 Perlindungan Hak Ekonomi Menurut Hukum Internasional.....	22
2.2.1 <i>Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works</i> 22	
2.2.2 <i>TRIPS Agreement</i>	24
2.2.3 <i>WIPO Copyright Treaty (WCT)</i>	25
2.3 Perlindungan Hak Ekonomi di Hukum Nasional	27
2.4 Perlindungan Hak Ekonomi di Aplikasi Ipusnas	30

2.4.1	Proses Memasukkan eBook ke Aplikasi Ipusnas.....	30
2.4.2	Format Buku di Aplikasi Ipusnas.....	32
2.4.3	Pemanfaatan DRM di Aplikasi Ipusnas	34
2.5	Meningkatkan Perlindungan Hak Ekonomi di Aplikasi Ipusnas	36
2.5.1	Tahap Pengadaan Buku.....	36
2.5.2	Tahap Membaca Buku	40
BAB III TANGGUNG JAWAB PELANGGARAN HAK CIPTA DI APLIKASI IPUSNAS		42
3.1	Pelanggaran Hak Cipta berdasarkan UU tentang Hak Cipta.....	42
3.2	Bentuk Posibilitas Pelanggaran Hak Cipta di Aplikasi Ipusnas.....	48
3.3	Mekanisme yang Dapat Ditempuh Apabila Terjadi Pelanggaran Hak Cipta di Aplikasi Ipusnas	49
3.3.1	Gugatan Perdata	50
3.3.2	Laporan Pidana.....	52
3.3.3	Penetapan Sementara Pengadilan.....	53
3.3.4	Arbitrase.....	54
3.4	Pihak yang Bertanggung Jawab Bila Terjadi Pelanggaran Hak Cipta di Aplikasi Ipusnas.....	56
3.4.1	Pelanggar.....	56
3.4.2	Aplikasi Ipusnas	58
BAB IV PENUTUP		61
4.1	Kesimpulan.....	61
4.2	Saran.....	62
DAFTAR BACAAN.....		63